



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,9 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 21.304.615.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 21.304.615.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta


Baroto
NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Daerah Khusus Jakarta

Baroto
NIP 197205311999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.733.789.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp1.733.789.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Daerah Khusus Jakarta



Baroto
NIP 197205311999031601



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah
Daerah Khusus Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031031



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hermansyah Siregar

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta


Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001


Baroto
NIP 197205311999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31 %
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.523.176.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.523.176.000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta


Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001


Baroto
NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Daerah Khusus Jakarta


Baroto
NIP 197205311999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 194,980,000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 194,980,000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Daerah Khusus Jakarta


Baroto
NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah
Daerah Khusus Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DK JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DK Jakarta

Baroto
NIP 197205311999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DK JAKARTA
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 21,136,000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 21,136,000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3,379,339,000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 3,379,339,000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DK Jakarta



Baroto
NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DK JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah DK Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta


Andry Indrady
NIP 198002292000021001


Baroto
NIP 197205311999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 69,440,000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 69,440,000,-

Jakarta, 08 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta


Baroto
NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baroto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Baroto

NIP 197205311999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfahmi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Baroto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah

Baroto
NIP 19720531 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi layanan AHU di Wilayah	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi dan diseminasi layanan AHU di Wilayah	100 orang
2.	Ditindaklanjutinya laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang ditindaklanjuti pada tingkat Majelis Pengawas Daerah	98,2%
3.	Terlaksananya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Jumlah permohonan KI di wilayah	80.866
4.	Terlaksananya tindak lanjut penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	Persentase aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan sengketa hak kekayaan intelektual di wilayah yang ditindak lanjuti	100%
5.	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah	1. Jumlah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang dilaksanakan di wilayah	1 Kegiatan
		2. Persentase penyusunan kerja sama kekayaan intelektual di wilayah	30%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 4.256.965.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.733.789.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.523.176.000,-

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah



Baroto
NIP 19720531 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfahmi

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2026

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Daerah Khusus Jakarta

Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Baroto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Baroto
NIP 19720531 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Daerah Khusus Jakarta

Kanti Mulyani
NIP 19760601 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	1. Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sesuai dengan permohonan	1 Laporan
		2. Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang selesai diharmonisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%
2.	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di wilayah	1 rekomendasi (10 Perda)
3.	Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	1. Jumlah pemberian layanan Bantuan Hukum Litigasi	424 Orang
		2. Jumlah pemberian layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	56 Kelompok Masyarakat
4.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di wilayah	Jumlah Anggota JDIH yang dibina di Wilayah Kerja Kantor Wilayah	1 Lembaga
5.	Terlaksananya pembinaan dan/atau pendampingan pos bantuan hukum di wilayah	Jumlah pos bantuan hukum yang dibina dan/atau didampingi	100 Lembaga
6.	Tersedianya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang diselesaikan	2 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 216.116.000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 194.980.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 21.136.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.379.339.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 3.379.339.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 69.440.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 69.440.000,-

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta



Baroto
NIP 19720531 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Daerah Khusus Jakarta



Kanti Mulyani
NIP 19760601 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2026

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Daerah Khusus Jakarta


Kanti Mulyani
NIP 19760601 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Magribi Putu Judhono
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Baroto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus
Jakarta

Baroto
NIP. 19720531 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Daerah Khusus Jakarta

Magribi Putu Judhono
NIP. 19770517 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
TUM 709 9.1. 1	Diselesaikannya laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait Kantor Wilayah	Jumlah laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait Kantor Wilayah	1 Laporan
TUM 709 9.2. 1	Terwujudnya layanan dukungan manajemen di Kantor Wilayah	Jumlah layanan dukungan manajemen di Kantor Wilayah	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 21.304.615.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 21.304.615.000,-

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus
Jakarta



Baroto
NIP. 19720531 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Daerah Khusus Jakarta



Magribi Putu Judhono
NIP. 19770517 200212 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Magribi Putu Judhono

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2026

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Daerah Khusus Jakarta

Magribi Putu Judhono
NIP. 19770517 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukino

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zulfahmi

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum



Sukino
NIP 197604252002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Jumlah masyarakat yang mengisi survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	100 orang
2.	Diselesaikannya laporan Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.733.789.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 1.733.789.000,-

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum



Sukino
NIP 197604252002121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukino

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum

Sukino
NIP 197604252002121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lusia Wahyuniati
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zulfahmi
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Lusia Wahyuniati
NIP 19700220 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektivitas Layanan Kekayaan Intelektual	Jumlah layanan KI yang sesuai dengan standar waktu pelayanan	80.866
2.	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	Jumlah penyelesaian sengketa KI yang difasilitasi di wilayah	100 %
3.	Terlaksananya Program Pembinaan dan Peningkatan Maturitas KI	Jumlah kegiatan penguatan sistem dan tata kelola KI	1 Kegiatan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.523.176.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.523.176.000,-

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Zulfahmi
NIP 19740617 199903 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual



Lusia Wahyuniati
NIP 19700220 198903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lusia Wahyuniati
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2026

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan
Intelektual

Lusia Wahyuniati
NIP 197002201989032001